

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan pemohon pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi serta *legal standing* Menteri dan Jaksa Agung dalam mewakili Pemerintah sebagai pemohon di Mahkamah Konstitusi. Bahwa Pemerintah sebagai pemohon dapat diwakili oleh Menteri dan Jaksa Agung dalam perkara pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan mengkaji bahan pustaka melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sejarah. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pembubaran partai politik dapat dilakukan melalui proses peradilan di Mahkamah Konstitusi dengan Pemerintah sebagai pemohon tunggal, namun dapat diwakili oleh Menteri dan Jaksa Agung. Pembatasan *legal standing* kepada Menteri dan Jaksa Agung dalam mengajukan permohonan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi perlu dipertimbangkan Kembali mengingat lembaga negara Pemerintah bukan hanya sebatas Menteri dan Jaksa Agung saja. Dengan demikian, ketentuan Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 12 Tahun 2008 perlu dilakukan perubahan guna memperluas *legal standing* pemohon dengan memungkinkan lembaga negara Pemerintah lainnya agar dapat mewakili Presiden dalam pembubaran partai politik.

Kata Kunci: Pembubaran Partai Politik, Mahkamah Konstitusi, *Legal Standing*.

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the provisions for applicants for the dissolution of political parties at the Constitutional Court and the legal standing of the Minister and Attorney General in representing the Government as applicants at the Constitutional Court. That the Government as applicant can be represented by the Minister and Attorney General in cases of dissolution of political parties at the Constitutional Court. This study is a normative legal study by reviewing library materials through a statutory, conceptual and historical approach. The results of this study indicate that the dissolution of political parties can be carried out through the judicial process at the Constitutional Court with the Government as the sole applicant, but can be represented by the Minister and Attorney General. The limitation of legal standing to the Minister and Attorney General in submitting an application for the dissolution of political parties at the Constitutional Court needs to be reconsidered considering that the state institutions of the Government are not only limited to the Minister and Attorney General. Thus, the provisions of Article 3 paragraph (1) of PMK Number 12 of 2008 need to be amended in order to expand the legal standing of applicants by allowing other state institutions of the Government to represent the President in the dissolution of political parties.

Keywords: *Dissolution of Political Parties, Constitutional Court, Legal Standing*